

IMPLEMENTASI PROGRAM *AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM* (ATCS) DI KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
MUHLISIN
NIM: 105180190**

**Pembimbing :
Nisaul Fadillah, S.Pd., M.Si., PhD
Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Maret 2023



Muhlisin
NIM:105180190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kee. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia
Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web: <https://uinjambi.ac.id/>, email: mail@uinjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Implementasi Program Area Traffic Control System (Atcs) Di Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariaah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 26 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 16 Agustus 2023





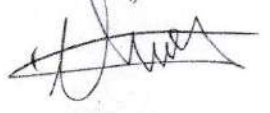

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Saxuni Una, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|--|---|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dra. Rafika, M.Ag</u>
NIP: 196809181994032003 | () |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, M.M</u>
NIP: 197603262002121001 | () |
| 3. Pembimbing I | : <u>Nisaul Fadillah, S.Pd., M.Si., PhD</u>
NIP: 197510102005012012 | () |
| 4. Pembimbing II | : <u>Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H</u>
NIDN: 2019118802 | () |
| 5. Penguji I | : <u>Muhammad Nuur, M.Sv</u>
NIP: 197304232006041003 | () |
| 6. Penguji II | : <u>Nofi Nurman, M.Si</u>
NIDN : 2010118703 | () |

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ :
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَغْطَى بِي ثَنْنٌ غَدَرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرَّ
رَأْفَاكَ لَثَوْنٍ نَوَّ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَسَوَّتٌ فَنَوَّوْا لَنْ يَغُطَّ أَحَدُهُمْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.” (Shahiul Bukhary No. 2227)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan maupun rohani. Shalawat beriring salam juga dipanjatkan kepada nabi Muhammaad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Kupersembahkan karya sederhanaku ini untuk ayahanda **Idris** dan Ibunda **Raisah**. Terimakasih yang telah membesarkanku, membimbing, mendidik, serta mendukungku hingga aku bisa sampai di titik ini. Insya Allah syurga akan menanti untuk ayah dan bunda kelak aamiin yarobbal`alamin.

Dan untuk teman-temanku seangkatan semangat untuk kalian dalam penyelesaian penulisan skripsi. Terimakasih telah berbagi keceriaan dan melewati suka dan duka selama kuliah. Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah swt. Aamiin yarobbal`alamin.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang membaruvak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Nama : Muhlisin

NIM : 105180190

Judul : Implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. -Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ATCS memberikan pengaruh yang baik terhadap kepatuhan berkendara. Di Kota Jambi ada sebanyak 23 persimpangan yang sudah terpasang ATCS, sejak Desember 2018. Hingga saat ini jumlah tilang online mencapai 888 surat tilang, namun hanya 300 surat tilang yang telah diantar kepada pelanggar lalu lintas. Penindakan surat tilang secara online tersebut masih terkendala salah satunya masyarakat yang masih apatis terhadap penindakan tilang tersebut. Respon masyarakat terhadap ATCS sangat positif, yang menandakan masyarakat mengharapkan ketertiban berkendara. ATCS itu sendiri bertujuan untuk menciptakan pengendara yang patuh akan rambu lalu lintas terutama pada jenis pelanggaran lalu lintas yaitu marka jalan dan menerobos lampu merah. Dalam implementasinya ATCS, Dinas Perhubungan menghadapi beberapa kendala sehingga ATCS belum begitu optimal penerapannya di Kota Jambi.

Kata Kunci: Implementasi, ATCS, Kota Jambi.

ABSTRACT

Nama : Muhlisin

NIM : 105180190

Judul : Implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Jambi

This study aims to determine the Implementation of the Area Traffic Control System (ATCS) Program in Jambi City. This study uses a qualitative method using an empirical juridical approach. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. The research findings show that ATCS has a good effect on driving compliance. In Jambi City, there have been 23 intersections that have ATCS installed, since December 2018. Until now, the number of online tickets has reached 888 tickets, but only 300 tickets have been delivered to traffic violators. Enforcement of speeding tickets online is still constrained, one of which is the public who are still apathetic towards the enforcement of these fines. The community's response to ATCS was very positive, indicating that the community expects orderly driving. The ATCS itself aims to create drivers who comply with traffic signs, especially for types of traffic violations, namely road markings and running red lights.

Keywords: Implementation, ATCS, Jambi City.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membaranyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Jambi*” merupakan salah satu kajian tentang pelaksanaan atau penerapan program ATCS pada Dinas Perhubungan Kota Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku wakil dekan I, II, dan III di Olingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum dan ibu Wenny Destina, S.Sos., M.si selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Ibu Nisaul Fadillah, S.Pd.,M.Si., PhD dan Bapak Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Maret 2023
Penulis,

Muhlisin
105180190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Kebijakan Publik	16
B. Implementasi Kebijakan	19
C. <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>	23
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Historin dan Geografis	28
B. Visi dan Misi inas Perhubungan Kota Jambi	29
C. Tugas Pokok dan Fungsi	30
D. Struktur Organisasi	30

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Program ATCS Di Kota Jambi45
B. Kendala Program Atcs Di Kota Jambi.....51
C. Respon Masyarakat Terkait ATCS di Kota Jambi.....55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan60
B. Saran.....61

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang serba modern ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan lagi dalam kehidupan manusia, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi atau kebaruan diciptakan untuk memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak manfaat dan kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang pemerintahan yang biasa disebut *e-government* mulai diterapkan oleh berbagai negara untuk menunjang peran sebagai pelayan masyarakat. Optimalisasi sistem *e-government* menjadi suatu yang krusial guna menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih responsif di era industri digital.

Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir. Salah satu yang menjadi perkembangan teknologi dewasa ini adalah dengan adanya alat-alat transportasi yang menjadi alat mobilitas masyarakat. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakan oleh manusia atau mesin. Alat transportasi seperti motor, mobil, kereta, pesawat terbang dan lain-lain yang saat ini menjadi salah satu bukti bahwa perkembangan teknologi sudah sangat maju, dimana kita bisa menuju ke sebuah daerah atau kota bahkan menuju negara lain hanya dengan hitungan jam saja, dan juga bisa memindahkan barang-barang dengan sangat mudah menggunakan alat-alat transportasi yang ada pada saat ini. Untuk itu alat transportasi sangat dibutuhkan sebagai alat mobilitas masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh

bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor.¹

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami tingkat kemacetan yang cukup parah. Hal demikian ditandai dengan berkembang pesatnya pertumbuhan kota, tingkat pergerakan manusia, serta ruang lingkup kehidupan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk, kendaraan, penghasilan, dan tenaga kerja. Sehingga menimbulkan peningkatan permintaan terhadap mode transportasi. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan di Indonesia adalah kendaraan bermotor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2020 terdapat 136.237.452 kendaraan bermotor di Indonesia.²

Pada data tersebut menandakan bahwa volume kendaraan yang ada di Indonesia sudah terbilang sangat banyak, tentu hal ini berkaitan dengan lalu lintas, karena lalu lintas adalah sebagai ruang gerak kendaraan dan orang, untuk itu permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang tidak bisa terhindarkan lagi dari kehidupan masyarakat, hampir setiap daerah pasti memiliki masalah mengenai lalu lintas mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas hingga pelanggaran lalu lintas.

Permasalahan utamanya didapatkan di persimpangan jalan. Peningkatan jumlah kendaraan dan meningkatnya jumlah pejalan kaki tidak disertai dengan peningkatan infrastruktur maupun sumber daya yang memadai. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah diantaranya membangun jalan baru dan membuat jalan layang. Didukung juga dengan pengembangan faktor pendukung lain yang berintegrasi infrastruktur maupun jalan raya yang ada. Namun masalah lalu lintas sangat rumit karena keterlibatan berbagai parameter, di antaranya; arus lalu lintas bergantung pada waktu dimana jam sibuk lalu lintas umumnya terjadi pada pagi hari dan sore hari dan pada hari-hari kerja, sistem lampu lalu lintas yang ada bekerja dengan pengaturan waktu yang statis sehingga pengaturan lampu lalu lintas tidak sesuai dengan kondisi real-time pada persimpangan. Indonesia sudah

¹ Abdul Kadir, Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau, Vol.1 No 3

² <https://www.bps.go.id>

mengembangkan sistem control lalu lintas terpusat yang dinamakan Auto Traffic Control System (ATCS).

Area Traffic Control System (ATCS) adalah sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengatur lampu lalu lintas di setiap persimpangan, atau sistem pengendalian lampu lain (APILL) secara terpusat dimana seluruh unsur APILL dihubungkan dengan saluran komunikasi antara controller di lapangan dengan komputer di pusat pengatur atau Central Control System Room.

Kemudian lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Jika didalam undang-undang ini juga mengatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebgaiian dari sistem transportasi yang harus dikembangkan potensi dan peranya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran ekonomi dan pengembangan wilayah ditambah pula pola pikir masyarakat yang hanya takut melanggar jika ada petugas, akan tetapi ketika tidak ada petugas maka pengendara tidak merasa takut dan cenderung akan melakukan tindak pelanggaran lalu lintas.

Jalan raya merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk menunjang seluruh aktivitas lalu lintas. Tetapi pada kenyataannya perkembangan Kota Jambi belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang mengakibatkan pergerakan arus lalu lintas yang kurang optimal. Hal itu terbukti dengan sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas pada hari-hari tertentu terutama pada jam-jam sibuk. Salah satu bagian dari jalan yang sangat berkaitan dengan masalah tersebut adalah simpang jalan. Kepadatan lalu lintas di Kota Jambi menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Menurut Subarsono implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Menurut George Edwad III implementasi kebijakan ialah proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan tersebut apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

implementasinya tidak akan terwujud begitu juga sebaliknya apabila dalam proses implementasi kebijakannya dilakukan dengan baik namun pada saat rumusan kebijakan tidak dipikirkan dengan matang maka samasaja tujuan kebijakan tersebut tidak akan bisa tercapai.³

Salah satu inovasi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam mengatasi kemacetan di Kota Jambi adalah dengan menerapkan pengaturan lalu lintas menggunakan teknologi Area Traffic Control System (ATCS). Melalui ATCS, pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dapat memantau kepadatan arus lalu lintas di tiap-tiap persimpangan atau ruas-ruas jalan. Hal tersebut juga dapat mendukung penerapan sistem tilang elektronik yang disebut e-Tilang. Adapun penerapan sanksi yang diberikan oleh petugas Dishub bagi pengguna jalan yang melanggar lalu lintas. Sanksi yang diberikan oleh petugas Dishub seperti turun dari kendaraan dan melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum, bentuk teguran hingga *shock therapy*. Hal ini juga yang dapat mendukung penerapan ATCS agar tidak terjadi lagi pelanggaran lalu lintas.

ATCS memberikan pengaruh yang baik terhadap kepatuhan berkendara, di Kota Jambi ada 23 persimpangan yang terpasang ATCS, sejak ATCS dan CCTV tersebut di pasang pada Desember 2018 hingga saat ini jumlah tilang online mencapai 888 surat tilang, namun hanya 300 surat tilang yang telah di antar kepada pelanggar lalu lintas. Penindakan surat tilang secara online tersebut masih terkendala salah satunya masarakat yang masih apatis terhadap penindakan tilang tersebut. Respon masyarakat terhadap ATCS sangat positif, ini menandakan masyarakat sangat rindu akan ketertiban berkendara.⁴ ATCS bertujuan untuk menciptakan pengendara yang patuh akan rambu lalu lintas terutama pada jenis pelanggaran lalu lintas yaitu marka jalan dan menerobos lampu merah, di dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala sehingga tidak begitu optimal di Kota Jambi.

³ Agies Nina Pramestarivia, dan Iradhad Taqwa Sihidi, "Implementasi Area Traffic Control System (ATCS) Sebagai Pelayanan Publik Di Dinas Perhubungan Kota Malang" *Journal of Governance Innovation*, Vol 4 No 2, Sep 2022, hal. 105

⁴ <https://www.metrojambi.com/pemasangan-atcs-dan-cctv-di-jambi-urai-kemacetan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penataan siklus lampu lalu lintas menggunakan ATCS berdasarkan input data lalu lintas yang diperoleh secara real time dan pemantau lalu lintas pada titik-titik persimpangan. Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat diubah berkali-kali dalam satu hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang mencakup keseluruhan wilayah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Tesya Margaretta Silaban dan Siti Hazzah Nur. R. yang berjudul “Implementasi Program Area Traffic Control System (Atcs) Dalam Ketertiban Berlalu Lintas Di Kota Medan” berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil penelitian terkait implementasi program *Area Traffic Control System (ATCS)* dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan sebagai bahwa implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System (ATCS)* dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan belum maksimal karena masih terdapat kendala-kendala dialami yaitu sumber daya finansial yang tidak memadai, sumber daya fasilitas seperti rendahnya durasi daya baterai *traffic light* dan panel box yang hilang akibat dicuri, lambatnya adaptasi dengan perkembangan teknologi, kurangnya sosialisasi serta masih terdapat masyarakat yang tidak patuh dalam berlalu lintas.⁵

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, dan Nurul Ramadhanie yang berjudul “Implementasi Sistem Pengawasan Cctv Lalu Lintas Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan)” didapati hasil bahwa pelaksana teknis sistem pengawasan CCTV lalu lintas, Kepala Dishub hingga operator CCTV bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dampak pengimplementasian kebijakan terhadap masyarakat belum efektif. Melihat masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terpantau oleh kamera CCTV menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan respon dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan ini belum efektif, karena masyarakat lebih takut terhadap petugas yang menjaga langsung di jalan dibandingkan hanya dipantau tanpa ada sanksi yang diberikan langsung Selain itu untuk mengoptimalkan tertib lalu lintas, saat ini belum

⁵ Tesya Margaretta Silaban, dan Siti Hazzah Nur. R, “Implementasi Program Area Traffic Control System (Atcs) Dalam Ketertiban Berlalu Lintas Di Kota Medan”, *Journal of Science and Social Research*, Feb 2023, VI (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

ada bentuk tindakan tegas untuk pelanggar dari Satlantas, karena belum ada kerja sama antara Satlantas dengan Dishub Kota Tanjungpinang. Namun untuk mengatasi kemacetan, kepadatan, masih bisa diatasi dengan pemanfaatan CCTV ATCS.⁶

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Agies Nina Pramestarivia dan Iradhad Taqwa Sihidi yang berjudul “Implementasi Area Traffic Control System (ATCS) Sebagai Pelayanan Publik Di Dinas Perhubungan Kota Malang” berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa engan adanya implementasi ATCS sebagai pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kota Malang dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas dan kemacetan di area Kota Malang. Penerapan program ini diharapkan kedepannya dapat memperlancar masyarakat dalam melakukan perjalanan di Kota Malang. Implementasi Kebijakan program ATCS sebagai pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kota Malang mendapatkan respon yang positif dari para pengendara.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengimplementasian program ATCS untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Implementasi Program *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kota Jambi.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi program ATCS di Kota Jambi ?
2. Apa kendala program ATCS di Kota Jambi ?
3. Bagaimana respon masyarakat terkait ATCS di Kota Jambi ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi program ATCS di Kota Jambi.
 - b. Untuk mengetahui kendala program ATCS di Kota Jambi.

⁶ Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, dan Nurul Ramadhania, “Implementasi Sistem Pengawasan Cctv Lalu Lintas Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan)”, *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 11 NO 1, 2020

⁷ Agies Nina Pramestarivia, dan Iradhad Taqwa Sihidi, “Implementasi Area Traffic Control System (ATCS) Sebagai Pelayanan Publik Di Dinas Perhubungan Kota Malang” *Journal of Governance Innovation*, Vol 4 No 2, Sep 2022

c. Untuk mengetahui respon masyarakat terkait ATCS di Kota Jambi.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Guna praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi pemerintah kota untuk membuat kebijakan dalam optimal program ATCS dinas perhubungan Kota Jambi
- b. Guna akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- c. Guna teoritis, mengembangkan teori keilmuan khususnya ilmu pemerintah yang berkaitan dengan pengoptimalkan ATCS (*Area Traffic Control System*).

D. Tinjauan Pustaka

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh karna itu, maka sebelum meneliti sebuah penelitian, peneliti melakukan tinjauan pustaka mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian yang menyangkut tentang ATCS, yakni penelitian yang pertama ialah Anggi Kartika Marpaung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi Unversitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan *Area Traffic Control System* (ATCS) Dalam Pengawasan Lalu Lintas Di Kota Medan“.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pemanfaatan *Area Traffic Control System* (ATCS) Dalam Pengawasa Lalu Lintas Di Kota Medan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tujuan diterapkannya sistem ATCS ini telah tercapai untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Hal ini sudah terbukti karena sebelum adanya penerapan ATCS persentase tingkat penanganan pelanggaran lalu lintas hanya dapat diatasi sebesar 30%, dan setelah adanya ATCS pelanggaran lalu lintas yang dapat ditangani sebesar 50%.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membandark sebacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keberhasilan penerapan ATCS ialah beberapa pelanggar yang tidak ingin dikenakan sanksi sosial seperti ditegur melalui sitem microfon di lampu merah, Data ini diambil dari sumber dishub kota jambi. Perencanaan dalam penerapan sistem ATCS juga sudah dilaksanakan dengan matang yaitu melalui cara manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan langsung oleh pemerintah Kota Medan yang bekerjasama dengan beberapa pihak , salah satunya yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan. Sistem pengawasan dan pengendalian sistem ATCS dilakukan diruangan CC-rooms yang dipantau langsung oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan. Super visi dalam pengawasan lalu lintas digunakan untuk meningkatkan kinerja petugas dalam menangani permasalahan lalu lintas, meningkatkan keefektifan pengawasan lalu lintas, serta meningkatkan kualitas situasi yang tertib berlalu lintas.

Penelitian kedua oleh Diki Fahrul mengenai “ Implementasi *Area Traffic Control System* Dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas Di Kota Serang“. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Respon pengendara setelah adanya ATCS di Kota Serang, para pengendara merespon positif dengan adanya ATCS di Kota Serang, karena dengan adanya ATCS ini merupakan suatu bentuk kemajuan tersendiri di Kota Serang.

Setelah adanya ATCS di Kota Serang para pengendara sedikit lebih patuh dalam berkendara, karena merasa diawasi oleh adanya perangkat CCTV, dan adanya peringatan dari pengeras suara, para pengendara juga menerima dan mendukung kebijakan dari pemerintah ini. Namun dalam proses Implementasi Area Traffic Control System (ATCS) dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas di Kota Serang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten bisa dikatakan belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya beberapa variabel dari model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn yaitu tujuan dari adanya ATCS di Kota Serang belum sepenuhnya tercapai, hal ini karena masih banyaknya pelanggaran lalu lintas di Kota Serang dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Kemudian sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya finansial dalam pengimplementasian ATCS di Kota Serang masih sangat kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang membaratkan sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dari segi jumlah ataupun pendidikan yang belum memadai dan tidak adanya tugas dan fungsi yang jelas di tingkat staff ATCS hal ini dikarenakan kekurangan sumber daya manusia sehingga para staff ATCS harus merangkap tugas baik sebagai operator ataupun teknisi di lapangan, serta tidak didukungnya dari lingkungan ekonomi yang akhirnya dana yang diberikan untuk pengimplementasian ATCS masih sangat kurang. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya respek dari masyarakat Kota Serang terhadap pemerintah dalam menjalankan kebijakan ATCS, kemudian adanya sikap menerima kebijakan ATCS, dan ATCS dibuat untuk memenuhi kepentingan publik. Dan faktor penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya baik sumberdaya manusia, finansial, dan waktu serta kerusakan perangkat seperti rusaknya pengeras suara untuk memperingati pelanggaran dan tidak diterimanya sinyal oleh room control yang disebabkan oleh cuaca buruk.

Penelitian yang ketiga oleh A.Zulfikar tentang “ Analisis Kinerja Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kota Makassar “

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh A.Zulfikar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pelaksanaan ATCS telah dilakukan selama ini belum optimal karena masih tingginya tingkat kemacetan yang ada di kota Makassar. Terdapat 4 aspek yang diteliti dalam penelitian ini serta dengan kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Input dalam hal jumlah pegawai saat ini sudah lebih dari cukup karena telah mengisi tempat mereka masing-masing, tetapi walaupun jumlah pegawai telah cukup, saat ini masih ada masalah yang perlu dibenahi dengan melakukan pelatihanpelatihan kepada pegawai karena rata-rata dari mereka belum tahu betul tentang kinerja pelaksanaan ATCS. Adapun dalam hal infrastruktur juga mempengaruhi kinerja pelaksanaanATCS dikarenakan masih banyak yang perlu ditambahkan dankurang meratanya pemasangan CCTVdi setiap persimpanganjalan yang ada di kota makassar sehingga mempengaruhi kinerja pelaksanaan ATCS dalam mengawasi arus lalu lintas di kota makassar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Proses dalam hal prosedur pelaksanaan ATCS terdiri dari pengawasan dan monitoring disetiap persimpangan jalan sehingga dalam pengawasan, dapat mengamati tingkat kepadatan lalu lintas. Adapun mekanisme-mekanisme dalam pelaksanaan ATCS itu terdiri dari pengawasan kondisi lalu lintas dan memperhatikan apa masalah yang terjadi, selanjutnya melakukan pengecekan dan apabila terjadi sebuah permasalahan dalam pengawasan lalu lintas yang terlihat dari layar monitor secepatnya akan dilakukan koordinasi kepada anggota-anggota yang ada dilapangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas agar kemacetan dapat dikurangi.
3. Output dalam hal ini hasil yang telah dicapai saat ini masih tahap melakukan pengawasan dan apabila terjadi masalah pada area persimpangan dapat langsung dikordinasikan dan membantu petugas kepolisian untuk memantau segala bentuk kejahatan yang ada di jalan dan pelanggaran-pelanggaran kendaraan bermotor yang terjadi.
4. Outcome dalam hal tingkat kualitas jasa yang dihasilkan dengan tercapainya optimalisasi jaringan dalam hal kinerja pelaksanaan ATCS optimalisasi jaringan belum berjalan sebagaimana fungsi ATCS, yaitu pengaturan waktu sinyal di persimpangan secara Responsif masih belum berjalan dan pemberian waktu untuk Kendaraan yang diprioritaskan seperti ambulans dan pemadam Kebakaraan belum terlaksana. Dan saat ini ATCS kota Makassar belum mempunyai situs yang berfungsi untuk melihat Langsung persimpangan-persimpangan jalan yang mengalami Kepadatan kendaraan melalui android. Dan dalam hal Mengurangi beban petugas ATCS saat ini membantu Mengurangi beban petugas lapangan dalam hal mengawasi Secara langsung kondisi lalu lintas dan pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁸ Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian sementara penelitian kuantitatif. Serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kualitatif adalah pengembangan dan mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini.

2. Tempat dan waktu penelitian

Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Jambi.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Data yang diperoleh dipenelitian ini merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang bersangkutan.

1) Data primer

Data primer ialah data yang diambil langsung dari dinas yang terkait tanpa perantara baik itu karyawan ataupun internet.⁹ Data primer disini adalah suatu data yang diperoleh oleh penulis dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini sebagai sumber data primernya sebagai berikut :

No	Informan	Jumlah data	Keterangan
1	Kepala Dinas Perhubungan	1	

⁸ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi revisi)*. (Jambi : Syariah Press, 2011), hlm 47

⁹ Sayuti Una, *Pendoman Penulisan Skripsi (Edisirevisi)*. (Jambi : Syariah Press, 2011), Hlm 178.

2	Operator ATCS	1	
3	Masyarakat umum	5	
	Jumlah	7	

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara.¹⁰ Dalam hal ini penulis memperoleh data-data dari internet berupa skripsi, jurnal, laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan terhadap subjek dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian berlangsung. Sumber data penelitian ini diperoleh dari: Artikel, buku, jurnal, dokumen dan sumber data yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode. Metode tersebut diantaranya:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah tatap muka antara dua orang yang saling berhubungan atau dengan kata lain penulis dengan sumber yang terkait dan melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ada beberapa sumber yang bisa dimintai penjelasan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Jambi.

1. Kepala dinas perhubungan
2. Operator ATCS
3. Masyarakat umum

b. Observasi

¹⁰ Sayuti Una, *Pendoman Penulisan Skripsi (Edisirevisi)*.(Jambi : Syariah Press, 2011), hlm 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang mempublikasikannya secara sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dengan cara mengandalkan penelitian secara teliti serta pencatatat sitematis.¹¹ Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di Dinas Perhubungan Kota Jambi.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi diperlukan alat instrument yang memandu untuk mengambil data- data dokumen dokumen yang tertulis tentang berbagai kejadian yang sudah terjadi. ¹²Dokumentasi dapat berupa catatan atau berkas-berkas penting yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.¹³

5. Teknik analisis data

Analisis data ialah data yang ada akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ada dalam penelitian ini. Ada 3 jenis data :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sajian analisi suatu bentuk analisi mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan.

b. Sajian Data

Sajian data adalah gabungan organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan pekerjaan suatu analisi ataupun perlakuan lain yang berlaar belakang pengertian tersebut.

c. Penarik Kesimpulan

¹¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*Teori Dan Praktek, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), Hlm 14

¹²W.Gulo, *metode penelitian*, (Jakarta :PT gramedia.2007), hlm 123

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2020), hlm 314



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ketika semua data terkumpul, penulis kualitatif mulai mencari arti benda, mencatat aturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi yang sesuai

6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ii penulisan, maka penulis susun sebagai berikut .

Bab I : pendahuluan :yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka .

Bab II : metode penelitian : di bab ini dibahas tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data .

Bab III : gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Jambi

Bab IV : pembahasan, dalam sub ini berisi mengenai Implementasi Program ATCS (*Area Traffic Control System*) Oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi

Bab V : penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran -saran .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang diperjualbelikan secara terbuka atau secara elektronik tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kebijakan Publik

Menurut Friedrich kebijakan merupakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu :

- a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama.
- b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir, artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.¹⁵

Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk

¹⁴ Andi Cudai Nur dan Muhammad Guntur, *Analisis Kebijakan Publik*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019), hal. 7

¹⁵ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah dan Nurhizrah Gistituati, Kebijakan publik: konsep pelaksanaan, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 6 No. 1, 2021, hal. 84

kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai :

- 1) Tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan.
- 2) Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri.
- 3) Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang.
- 4) Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu.¹⁶

Menurut Bridgeman dan Davis menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).

- 1) Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

- 2) Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah

¹⁶ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah dan Nurhizrah Gistituati, Kebijakan publik: konsep pelaksanaan, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 6 No. 1, 2021, hal. 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3) Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensitif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap penyusunan agenda
- 2) Tahap formulasi kebijakan
- 3) Tahap adopsi kebijakan
- 4) Tahap implementasi kebijakan
- 5) Tahap evaluasi kebijakan

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari komoditas politik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan publik didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program kebijakan.

pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah disahkan. Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah munculnya konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil pelaksanaan kebijakan yang dievaluasi akan mendapatkan hasil yang diharapkan (*intended*) atau juga hasil yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*). Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan akan memiliki dampak. Pelaksanaan kebijakan terdiri dari tiga unsur utama yaitu :

- 1) Spesifikasi rincian program yaitu spesifikasi rincian program berhubungan dengan dimana dan bagaimana lembaga melaksanakan program dan seperti apa program atau hukum ditafsirkan.
- 2) Alokasi sumber daya yaitu berhubungan dengan pembiayaan, personil dan organisasi yaang melaksanakan serta bertanggung jawab atas keterlaksanaan program.
- 3) Keputusan yaitu berhubungan dengan ketetapan yang dilaksanakan.

Sebuah kebijakan dikatakan berhasil apabila memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Artinya bahwa kebijakan mampu mengarahkan masyarakat menjadi lebih terarah dan sesuai dengan keinginan pemerintah. Maka pemerintah memiliki kewajiban dalam mengawasi keterlaksanaan kebijakan melalui perancangan program dan strukturisasi proses pelaksanaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakala kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (public policy).

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle juga menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁷

Selain itu terdapat pendapat-pendapat lain dari para ahli. Berikut pengertian implementasi dalam buku Analisis kebijakan publik karya subarsono¹⁸ :

¹⁷ Andreas Delpiero Roring, Michael S. Mantiri dan Marlien T. Lopian, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 2, 2021, hal. 3

¹⁸ AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hal 290

1. Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
2. Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
3. Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah (*implimentation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu).
4. Wahab menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
5. Dunn menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan 20 dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang membarwak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implementasi merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) dan juga suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonsepsikan sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan.

Implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwasanya implementasi merupakan salah satu dari variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah atau persoalan.

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi

Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dan sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan.

2. Sumberdaya

Variabel Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kebijakan kesulitan dalam mengimplementasikannya.

¹⁹ AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hal 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebadai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. disposisi (sikap)

Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana. Ada tiga hal yang terdapat didalam disposisi atau sikap pelaksana yang merupakan unsur penting dalam implementasi yaitu:

- a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan
- b. Arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan (penerimaan dan penolakan).
- c. Intensitas dari respon

4. Stuktur birokrasi

Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan. Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan.

- a. Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau yang sering disebut sebagai Standart Operating Procedures (SOP).
- b. Adapun pengaruh struktur organisasi bagi implementasi SOP adalah menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi.²⁰

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan

²⁰ AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hal 90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi jika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal inipun dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan.

C. Program Area Traffic Control System (ACTS)

Program Area Traffic Control System (ATCS) merupakan suatu program pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas disetiap persimpangan. Program Area Traffic Control System (ATCS) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2343/KP.108/DRJD/2015 tentang Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System).²¹

Area Traffic Control System (ATCS) atau dalam bahasa Indonesia diartikan Sistem Kendali Lalu Lintas merupakan salah satu dari upaya manajemen rekayasa lalu lintas yaitu pengendalian lalu lintas pada persimpangan yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. ATCS ini merupakan suatu sistem yang mengatur persimpangan jalan dan bisa memperingati melewati CCTV

²¹ Tesya Margaretta Silaban, dan Siti Hazzah Nur. R, Implementasi Program Area Traffic Control System (Atcs) Dalam Ketertiban Berlalu Lintas Di Kota Medan, *Journal of Science and Social Research*, Feb 2023, VI (1), hal 182

bersuara kepada pengendara yang terlihat melanggar marka jalan dan rambu lalu lintas.

ATCS adalah suatu sistem yang digunakan untuk memonitoring lalu lintas dengan menggunakan CCTV. Selain itu, ATCS juga berfungsi sebagai pengatur pemberian waktu pada lampu lalu lintas. Akan tetapi, belum ada sistem terintegrasi antara kondisi lalu lintas real-time dengan pengaturan waktu di ATCS.

Penataan siklus lampu lalu lintas menggunakan ATCS berdasarkan input data lalu lintas yang diperoleh secara real time dan pemantau lalu lintas pada titik-titik persimpangan. Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat diubah berkali-kali dalam satu hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang mencakup keseluruhan wilayah tersebut

Dengan adanya penerapan ATCS atau lampu lalu lintas terkoordinasi maka akan terjadi efisiensi pergerakan dan akan meningkatkan kapasitas simpang untuk melayani lalu lintas, waktu perjalanan yang lebih pendek, penurunan tingkat resiko kecelakaan bagi pengendara dan kesempatan juga keselamatan yang lebih tinggi bagi pejalan kaki/penyeberang jalan serta kenyamanan pengguna jalan yang lebih baik. ATCS sangat baik diterapkan pada persimpangan yang mempunyai banyak titik konflik pergerakan lalu lintas dan volume lalu lintas yang cukup tinggi.²²

Area Control Traffic System atau yang dikenal dengan ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi di suatu kawasan, wilayah, area, daerah. ATCS dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. ATCS yang tidak responsif Menggunakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dioperasikan secara fixed setting berdasarkan data survey tanpa ada sinkronisasi terhadap laju trafik aktual pada simpang.
- b. ATCS yang semi responsif Menggunakan detector kendaraan pada APILL dan melakukan sinkronisasi berdasarkan trafik aktual pada simpang yang bersangkutan saja, tetapi tidak ada pengelolaan lalu lintas secara menyeluruh dan terkoordinasi di seluruh wilayah (region).

²² Fauziah Ramadhana Naway, dan Fitri Suryani, Perencanaan Area Traffic Control System (ATCS) Untuk Optimasi Kinerja Persimpangan Pada Jalan H.M Juyo Martono Kota Bekasi, *Jurnal IKRAITH-TEKNOLOGI*, Vol 7 No 1 Maret 2023, hal 57

- c. ATCS yang fully responsif Memiliki pusat pengendalian APILL berhubungan dengan komputer dan dilengkapi dengan alat pencatat pergerakan arus lalu lintas berupa detektor sehingga program pengaturan nyala lampu besarnya dapat berubah-ubah.²³

ATCS mempunyai sistem operasi menggunakan server, work station, yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area, wall map, yang berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi dari local controller, Local controller (pengontrol persimpangan), Video surveillance (CCTV), vehicle detector. Cara kerja ATCS berdasarkan distribusi kepadatan, sistem ini mengontrol lampu lalu lintas otomatis dengan menggunakan kamera berbasis micro controller yang bekerja menggunakan lampu lalu lintas secara default control, yaitu searah dengan arah jarum jam. Jika PC terkoneksi dengan micro controller, maka micro controller mengirimkan informasi jalur mana yang lampu hijaunya akan menyala. Apabila tidak ada koneksi antara PC dan Mikro kontroler, maka penyalaaan lampu hijau adalah 6 detik. Pada umumnya arah perpindahan lampu lalu lintas dapat diatur sesuai dengan arah jarum jam (clock wise) atau berlawanan arah jarum jam (counter clock wise). Lampu lalu lintas bekerja secara bergantian pada tiap jalur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan urutan menyala lampu hijau, kuning dan merah.

Sedangkan ATCS berfungsi untuk mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi, dalam kondisi tertentu memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas seperti ambulance, tamu kenegaraan, dan lain-lain, menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan, menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan dan kejadian lainnya di persimpangan. ATCS bermanfaat bagi lancarnya lalu lintas, adapun manfaat ATCS yakni optimalnya kinerja jaringan jalan, terwujudnya sistem lalu lintas dan

²³ Anggi Kartika Marpaung, Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS) dalam Pengawasan Lalu Lintas di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL)*, 2(1). Hal. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

angkutan jalan yang aman, selamat dan berwawasan lingkungan, berkurangnya jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan.²⁴

Adapun cara kerja ATCS, yaitu :

- a. Dimulai dengan merekam aktifitas simpang dengan menggunakan kamera pemantau jenis PTZ kamera. PTZ adalah singkatan dari Pan Tilt Zoom. Pan kemampuan kamera untuk dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Tilt 13 kemampuan kamera dapat bergerak ke atas dan kebawah. Zoom kemampuan kamera untuk memperbesar gambar hingga beberapa kali lipat.
- b. Menggunakan kabel fiber optik, hasil rekaman tersebut dilanjutkan ke Node Controller ATCS. Node controller ATCS merupakan kumpulan beberapa perangkat komunikasi data ATCS yang saling terhubung. Pada node controller tersebut hasil rekaman diolah menjadi data untuk dilanjutkan ke room server untuk mengolah pergerakan kamera dilapangan.
- c. Pada room server ini terdapat banyak perangkat yang tersimpan dalam rak kabinet U19. Salah satu perangkat yang memegang peranan penting adalah proxy streaming&NVR Server. Proxy streaming&NVR server digunakan sebagai media penyimpanan rekaman yang ditangkap dari kamera dan digunakan sebagai proxy streaming server streaming yang mana proxy server mampu meneruskan permintaan dari client ke kamera yang terpasang dalam satu jaringan lokal (LAN).
- d. Hasil rekaman dapat dilihat pada workstation (CCTV Client) yang terdiri dari aplikasi CCTV client yang berfungsi memantau, mengontrol, memindai gambar dan fungsi public announcer pada suatu lokasi yang terpasang kamera dan speaker yang terkoneksi didalam jaringan lokal (*Local Area Network*).
- e. Pengaturan waktu siklus ditentukan pada workstation (*traffic client*) yang berisikan aplikasi traffic client yang digunakan untuk mengatur data persimpangan dan mengendalikan simpang yang terkoneksi didalam jaringan lokal (*Local Area Network*).

²⁴ Ni Luh Wayan Rita Kurniati, Optimisasi Kinerja Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Balikpapan, *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Vol. 21, No.2, Des 2019, hal 158

- f. Setelah melewati beberapa tahap, pergerakan dari beberapa simpang yang sudah terkoneksi di dalam jaringan lokal (Local Area Network) dapat dilihat pada suatu wall display yang terdiri dari beberapa monitor (multi-monitor).²⁵

Fungsi dari ATCS ini adalah :

- a. Dapat mengatur waktu sinyal di persimpangan sehingga penggunaan jalan mendapatkan tundaan minimum.
- b. Memberikan prioritas lampu hijau di persimpangan.
- c. Dalam keadaan tertentu, memberikan lampu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas seperti ambulan pemadam kebakaran dan lainnya.
- d. Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan.
- e. Menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian yang lainnya di persimpangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaaiaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁵ Anggi Kartika Marpaung, Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS) dalam Pengawasan Lalu Lintas di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik (JIMSIPOL)*, 2(1). Hal. 26

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis dan grafis

1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Jambi

Kota Jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 10 daerah kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara historis pemerintah Kota Jambi di bentuk dengan ketetapan gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom kota Besar di Sumatera, kemudian di perkuat dengan Undang-Undang No.9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.

Dengan dibentuknya Provinsi Jambi tanggal 6 januari 1948, maka sejak itu pula Kota Jambi resmi menjadi ibukota provinsi, dengan demikian Kota Jambi sebagai Daerah Tingkat II pernah menjadi bagian dari tiga provinsi yakni Provinsi Sumatera, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Jambi sekarang. Salah satu tuntutan era reformasi yang berkembang saat ini, memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi publik. Dalam pelaksanaan pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip *good governance* antara lain mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dan responibilitas dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/18/M.P AN/I1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian dan pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi No.14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, pada awal tahun 2017 penggabungan dari kantor pengelola parkir menjadi kantor dinas perhubungan kota jambi, dan menjadi bidang pengelola parkir dinas perhubungan kota jambi

dalam pembentukan unit pelaksana teknis terdiri dari UPT terminal barang, UPT terminal penumpang serta UPT pengujian kendaraan bermotor.

2. Sekretariat

Alamat kantor dan UPTD dinas perhubungan kota jambi

1) Kantor

Jln. Lingkar selatan kenali asam bawah terminal truck pall X

2) UPTD angkutan barang

Jln. Lingkar selatan pall X

3) UPTD angkutan penumpang

Jln. Sersan zuraida kec. Pasar jambi

4) UPTD pengujian kendaraan bermotor

Jln. Lingkar selatan talang gulo kec. Kota baru

5) Jumlah pegawai

PNS : 125 orang

TKK : 179 orang

Honorer : 2 orang

TKS : 4 orang

B. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi

1. Visi Dinas Perhubungan kota jambi

Menjadi sistem transportasi yang handal dan terjangkau dalam masyarakat

2. Misi Dinas Perhubungan kota jambi

- a. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang berorientasi terbentuknya ramah lingkungan
- c. Menciptakan faktor penunjang mobilitas masyarakat melalui peningkatan pelayanan transportasi dalam mencapai pusat-pusat kegiatan dan pelayanan perkotaan secara aman dan nyaman
- d. Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan jasa dan prasarana transportasi secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

e. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan dana pembangunan prasarana transportasi darat dan sungai

3. Moto

Mendengar (menerima keluhan dan saran dari masyarakat)

Melihat (turun kelapangan/ crosceck)

Berbuat (action cepat tanggap)

4. Maklumat

Kami berupaya dengan sungguh- sungguh untuk

1. Memberikan pelayanan prima dan mengutamakan kepuasan sebagai prioritas kami
2. Memberikan pelayanan secarah ramah, bertanggung jawab, mudah dan transparan sesuai denagn visi kami “ menjadikan sistem transportasi yang handal dan terjangkau oleh masyarakat “
3. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar perlayana yang telahb ditetapkan .

C. Tugas dan fungsi

1. dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penelaahan dan evaluasi dokumen teknis pembangunan infrastruktur transportasi.
2. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi perhubungan.
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaodan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas.
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas.
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan di bidang Perhubungan.
- d. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem Perhubungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan dan aset serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup dinas dan sekretat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat.
- b. Pengekoordinasian penyusunan kebijakan dan regulasi teknis bidang Perhubungan.
- c. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang dinas.
- d. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis di bidang Perhubungan.
- e. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat dinas.
- f. Pengelolaan kearsipan dinas.
- g. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara dinas.
- h. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor dinas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kerumahtanggaan dinas.
- c. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan kepegawaian dinas.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan dinas.
- e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban dinas.
- f. Pelaksanaan pengelolaan ruang rapat atau ruang pertemuan dinas.
- g. Pelaksanaan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan dan pendistribusikan prasarana dan sarana dinas.
- h. Pelaksanaan kegiatan pengembangan karir pegawai dinas.
- i. Penghimpunan, pengeolahan, penyajian dan pemeliharaan data, informasi dan dokumen kepegawai.
- j. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai.
- k. Pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai.
- l. Pelaksanaan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pension pegawai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- m. Penyiapan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan.
- n. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas.
- o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas subbagian.
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kepala Subbagian Program, Keuangan Dan Aset

Kasubbag Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan rencana dan program kesekretariatan, menghimpun dan menyusun standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM), dan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) / rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) serta menatausahakan administrasi keuangan dan mengelola aset dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasubbag program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat.
- b. Penghimpunan dan penyusunan SOP dan SPM dinas.
- c. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD dinas.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dinas.
- e. Penghimpunan dan penyusunan bahan pertanggungjawaban keuangan dinas.
- f. Penerimaan, penelitian dan pengujian kelengkapan serta pemrosesan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara.
- g. Pelaksanaan proses penebitan SPM.
- h. Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan dinas.
- i. Pelaksanaan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- j. Pencatatan, pembukuab dan penyusunan akuntansi asset dinas.
- k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas subbagian.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi

Kepala Bidang pengembangan Jaringan Transportasi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan pelaksanaan kegiatan dinas, musyawarah perencanaan pembangunan dan dokumen usulan pembangunan sarana dan prasarana serta penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dan Rencana Kerja (RENJA). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian, penyiapan rencana program kegiatan dan penyusunan dokumen pengadaan, perencanaan usulan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dinas.
- b. Pengoordinasian, perumusan dan penyiapan rencana pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta pengembangan jaringan transportasi.
- c. Pengoordinasian, perumusan dan penyiapan bahan penelitian dan evaluasi pengembangan transportasi.
- d. Pengoordinasian dan penyusunan laporan tahunan, laporan pelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggung jawaban Pengoordinasian

6) Kepala Seksi Pendataan Dan Informasi

Kasi Pendataan dan Informasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan, melaksanakan, mengolah data-data operasional di sektor perhubungan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengolah *Website* dan/atau *email* dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pendataan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan, Pengolahan dan penyusunan *Data Base* sector perhubungan.
- b. Pengembangan sistem informasi dinas.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan profil dinas.
- d. Penyiapan dan pengelolaan data dan informasi sector transportasi melalui
- e. Penyiapan, penyajian data informasi dan teknologi di sektor perhubungan.
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan operasional *website*
- g. Penyusunan / penyiapan rencana dan penyampaian data dan informasi sarana dan prasarana transportasi.
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pendataan dan pendataan dan informasi.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Jaringan

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, dokumen pembangunan dan pengembangan sistem transportasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan dan penyiapan rencana program kegiatan dinas perhubungan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan, penelitian dan penelaahan dokumen perencanaan pembangunan serta usulan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyebarkan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Penyiapan rencana pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi
- d. Pelaksanan penyusunan bahan Rencana Strategis.
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bshsn pertimbangan pengambilan kebijakan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain.
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Dan Monitoring

Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun dan menyusun laporan evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, LPPK dan RKT/RENJA. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian meyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas.
- b. Penganalisaan, pengkajian dan evaluasi data hasil pelaksanaan program kerja dinas.
- c. Penganalisaan dan penyusunan bahan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK).
- d. Penganalisaan dan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan LPPD.
- e. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan LKPJ, RENJA dan RKT Dinas Perhubungan.
- f. Penyiapan dan penyusunan bahan monitoring dan pelaporan program kerja Dinas serta program pembangunan secara periodik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian.

9) Kepala Bidang Perhubungan Darat Dan Perkeretaapian

Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas perhubungan darat dan perkeretaapian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas angkutan darat dan perkeretaapian.
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas teknis keselamatan.
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan transportasi darat dan perkeretaapian.
- e. Pengoordinasian dan perumusan pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- f. Perumusan dan pengkajian penetapan jaringan transportasi jalan dan perkeretaapian.
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan, pelayanan dan pengendalian angkutan jalan.
- h. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit terkait.
- i. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan transportasi darat dan perkeretaapian.
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10) Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka mengumpulkan dan mengelola data kecelakaan, menyelenggarakan operasional terminal penumpang dan angkutan jalan serta menyiapkan bahan kebijakan penetapan jaringan transportasi jalan dan perkeretaapian, rekomendasi perizinan serta pelayanan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dan perkeretaapian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Lalu Lintas dan angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi lalu lintas dan angkutan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek.
- d. Penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran / penyalahgunaan perizinan dan non perizinan angkutan orang.
- e. Penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan penetapan tarif angkutan antar kota dalam provinsi jambi kelas ekonomi.
- f. Penyiapan, penyusunan rencana program penyelenggaraan operasional terminal tipe B.
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi lalu lintas dan angkutan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



11) Kepala Seksi Prasarana

Kepala seksi Prasarana mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pemantauan, Penyusunan analisis unjuk kerja operasional prasarana dan pengawasan teknis prasarana lalu lintas jalan dan perkeretaapian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan bahan rencana program pemantauan dan analisis kerja operasional prasarana jalan dan perkeretaapian.
- b. Penyusunan bahan rencana program usulan peningkatan kapasitas jalan, terminal dan kebutuhan lalu lintas.
- c. Perumusan bahan rencana program kebijakan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, terminal serta perkeretaapian.
- d. Penyiapan perumusan bahan rencana program perbaikan lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di jalan provinsi.
- e. Penyiapan, penyusunan dan evaluasi bahan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan audit keselamatan jalan, inspeksi lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) serta analisis dampak lalu lintas (Amdal Lalin).
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12) Kepala Seksi Tehnik Sarana Dan Keselamatan

Kepala Seksi Tehnik Sarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis unjuk kerja sarana dan pengawasan teknis sarana serta keselamatan lalu lintas jalan dan perkeretaapian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Tehnik Sarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tehnik sarana dan keselamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Penyiapan penyusunan bahan rencana program peningkatan sarana lalu lintas angkutan jalan dan perkeretaapian.
- c. Penyiapan perumusan bahan rencana program pengawasan teknis sarana dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi dan perkeretaapian.
- d. Penyelenggaraan dan pengendalian kawasan daerah rawan kecelakaan (DRK) pada jalan provinsi.
- e. Perumusan dan penyusunan bahan-bahan pembinaan kebijakan standar teknis pelaksanaan penyelenggaraan pengujian berkala, industry karoseri.
- f. Penyiapan dan perumusan bahan rencana program evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan penyesuaian dimensi serta spesifikasi teknis kendaraan bermotor.
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi tehnik sarana dan keselamatan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13) Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai Danau Dan Penyeberangan Dan Udara

Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan dan Udara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan dan udara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perhubungan Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan dan Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jasa perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan dan udara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas keselamatan pelayaran dan angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- c. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan terhadap penyelenggaraan angkutan laut, sungai danau dan penyeberangan dan udara.
- d. Pelaksanaan dan pemberian rekomendasi di bidang perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan dan udara.
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan angkutan laut, sungai danau dan penyeberangan dan udara.
- f. Penyiapan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- g. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang.
- h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang.
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14) Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan

Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan dan perumusan bahan pembinaan dan pelayanan jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- b. Penyiapan bahan rekomendasi angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- c. Penyelenggaraan dan penyiapan bahan bimbingan angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- d. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- f. Penyiapan bahan rencana program kebutuhan rambu-rambu sungai.
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikann atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

15) Kepala Seksi Perhubungan Laut

Kepala Seksi Perhubungan laut mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan membantu bidang dalam rangka penyiapan dan perumusan bahan pembinaan dan pelayanan jasa perhubungan laut. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakn teknis penyelenggaraanperhubungan laut.
- b. Penyiapan bahan rekomendasi penyelenggaraan perhubungan laut.
- c. Penyiapan bahan bimbingan penyelenggaraan perhubungan laut.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan perhubungan laut.
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perhubungan laut.
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perhubungan laut.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

16) Kepala Seksi Perhubungan Udara

Kepala Seksi Perhubungan Udara mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis bahan pembinaan dan pelayanan jasa perhubungan udara. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perhubungan udara.
- b. Penyiapan bahan rekomendasi penyelenggaraan perhubungan udara.
- c. Penyiapan bahan bimbingan penyelenggaraan perhubungan udara.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan perhubungan udara.
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perhubungan udara.

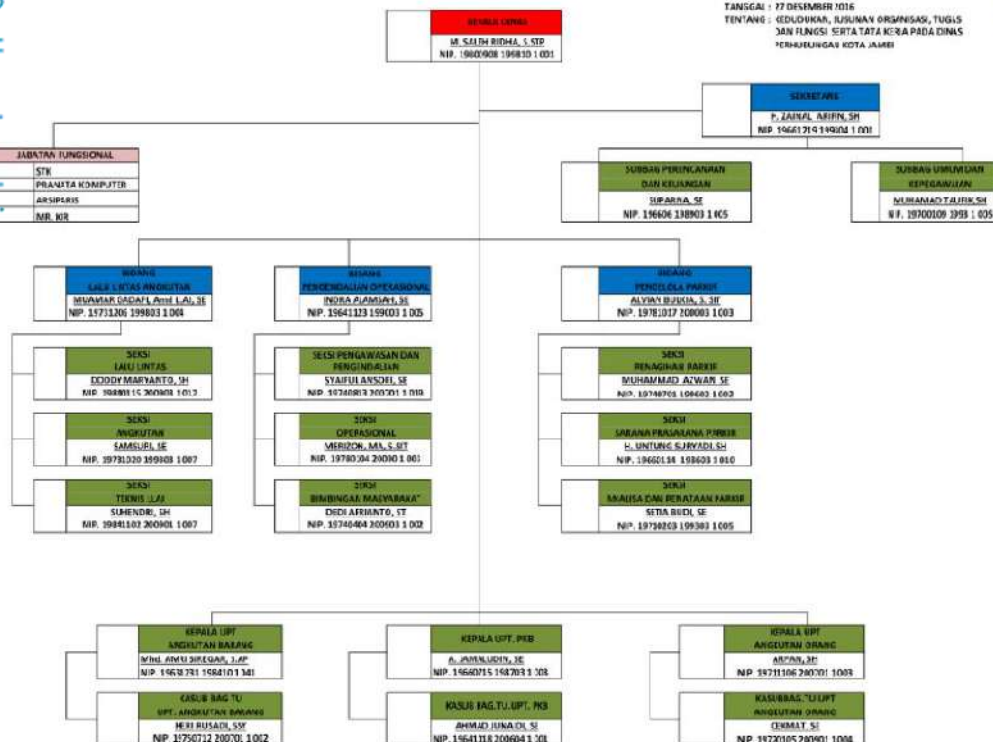
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 40 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2018
 TENTANG : GEDLOKKA, SUSUNAN ORGANISAS, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS
 PERHUBUNGAN KOTA JAMBI



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acuan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
 J. A. M. I.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program ATCS Di Kota Jambi

Menurut George Edward III implementasi kebijakan ialah proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan tersebut apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka implementasinya tidak akan terwujud begitu juga sebaliknya apabila dalam proses implementasi kebijakannya dilakukan dengan baik namun pada saat rumusan kebijakan tidak dipikirkan dengan matang maka samasaja tujuan kebijakan tersebut tidak akan bisa tercapai.

Solusi masalah sosial muncul dari berbagai model implementasi kebijakan yang berlangsung di dalam organisasi pada berbagai tingkatan. Gambaran program pelayanan publik seperti program ATCS dalam penerapannya ATCS merupakan sistem pengaturan lalu lintas berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan dengan mengkoordinasikan pengaturan lalu lintas lalu lintas di setiap persimpangan.

Dimensi standar dan sasaran penerapan kebijakan program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Jambi yaitu terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan, mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan berwawasan lingkungan, dan mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas dipersimpangan. Adapun agar sasaran dan standar kebijakan program ATCS dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Jambi dapat tercapai maka melibatkan beberapa pihak seperti Dinas Perhubungan Kota Medan, Satlantas dan Polres Kota Jambi.

Tujuan dari adanya ATCS di Kota Jambi ini untuk menjadikan masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas dengan cara memberikan himbauan mengenai lalu lintas dan peringatan kepada pengendara yang melanggar lalu lintas, kemudian untuk mengurai kemacetan dengan cara mengatur siklus lampu lalu lintas dipersimpangan, kemudian untuk mengurangi tingkat kecelakaan, dan kamera cctv yang terpasang bisa dijadikan sebagai alat bukti kepolisian untuk

melakukan penyelidikan apabila terjadi tindak pidana di area yang terpantau ATCS.

Berdasarkan keterangan kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha mengatakan :

“Melalui penerapan ATCS, titik-titik lampu merah yang berada dipersimpangan Kota Jambi dapat diatur langsung melalui ruangan city operation center (COC). Jadi apabila terjadi kemacetan yang panjang dapat diurai secara langsung dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti laka lantas maka rekaman dari kamera ATCS bisa dijadikan sebagai barang bukti.”²⁶

Salah satu pegawai dishub bapak Erik Hamzah(25) yang memantau langsung program ATCS menyebutkan bahwa: “program ini sangat membantu Dishub untuk kejadian yang tidak diinginkan seperti laka lantas”.²⁷

Walaupun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan yang ada, hal ini dikarenakan masih banyaknya pengendara yang masih melanggar lalu lintas dan tingkat kesadaran lalu lintas masyarakat yang masih kurang.

Tabel 1.1
Titik ATCS Kota Jambi²⁸

No	Titik Atcs Kota Jambi
1.	Simpang Jelutung
2.	Simpang Bata
3.	Simpang Suka Rejo
4.	Simpang Pasir Putih
5.	Simpang Mayang
6.	Simpang Mandiri

²⁶ Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha pada tanggal 17 Januari 2023

²⁷ Wawancara petugas ATCS Dishub Kota Jambi Erik Hamzah pada tanggal 17 Januari 2023

²⁸ Dokumen ATCS Jambi Dinas Perhubungan Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

8.	Simpang Makalam
9.	Simpang Pulai
10.	Simpang Rindu
11.	Simpang Rimbo
12.	Simpang Museum Juang
13.	Simpang Adipura
14.	Simpang Tanjung Lumut
15.	Simpang Selamat Datang
16.	Simpang Masjid Nurdin
17.	Simpang Pall X
18.	Simpang Pall VII
19.	Simpang Kawat
20.	Simpang Gado Gado
21.	Simpang Sijenjang
22.	Simpang Tanjung
23.	Simpang Honda(Sinsen)
24.	Simpang 3 Mendalo
25.	Simpang 4 Aurduri
26.	Simpang BI
Jumlah = 26 Simpang	

Tabel 1.1 merupakan titik penempatan ATCS yang berada di Kota Jambi. Total ATCS di Kota Jambi sebanyak 26 sedangkan kamera yang terpasang 33 kamera. Program ATCS diterapkan di Kota Jambi ,mulai dari 2022 tahun lalu mereka meletakkan titik titik cctv di beberapa simpang yang perlu diperhatikan, khususnya yakni simpang pal 10 karna simpang tersebut titik keluar masuknya pengendara dari luar kota maupun pengendara yang ingin keluar kota tidak jarang pula ATCS merekam kejadian laka lantas dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara serta dalam keadaan tertentu memberikan waktu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas seperti damkar, ambulance dan lain-lain.

Pemerintah Kota Jambi berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas di jalan. Salah satunya dengan memanfaatkan kamera dan voice announcer pada simpang simpang yang telah terpasang area traffic control system (ATCS). Pengendara yang melanggar akan terlihat di kamera dan akan diingatkan langsung melalui voice announcer ATCS.

Dinas Perhubungan Kota Jambi, ATCS voice sudah dimanfaatkan sejak awal pandemi Covid-19 untuk imbauan penerapan protokol kesehatan. Termasuk menggunakan teknologi running text yang telah terpasang di beberapa simpang jalan.

Dinas Perhubungan Kota Jambi sudah berkoordinasi dengan Pemda Jambi Terutama untuk bisa mengelola ATCS di titik lain yang selama ini pengadaan oleh Pemda Jambi agar terintegrasi seperti di simpang simpang yang ada dikota Jambi Selain itu dimungkinkan dengan sistem tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE) kepolisian.

Selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha menambahkan:

“Dari hasil pemantauan kamera ATCS selama ini pengendara kebanyakan melanggar garis marka di simpang. Petugas Dinas Perhubungan Kota Jambi akan mengingatkan pengendara yang melanggar itu melalui ATCS voice agar tertib marka dengan menyebutkan nomor polisi kendaraan pelanggar”²⁹

Lalu Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha juga menambahkan:

“Harapannya saat ini dari penerapan ATCS dan CCTV yaitu sistem tilang elektronik atau e-tilang dapat berjalan dengan maksimal sehingga masyarakat akan lebih tertib dalam berkendara.”³⁰

²⁹ Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha pada tanggal 17 Januari 2023

³⁰ Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha pada tanggal 17 Januari 2023



Untuk menganalisis implementasi program Area Traffic Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Jambi terdapat beberapa dimensi serta indikator dalam implementasi seperti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi dinilai menjadi indikator yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan cara penyampaian ide, gagasan, peraturan dan lain-lain. Komunikasi harus akurat dan dapat dimengerti oleh pelaksana kebijakan. Pihak yang terlibat dalam pengimplementasian ATCS di Kota Jambi ini adalah Polres Kota Jambi, komunikasi yang dibangun antara pihak Dishub Kota Jambi dan Polres Kota Jambi yaitu saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, misalnya ketika terjadi tindak pidana yang terekam cctv dari ATCS maka bisa dijadikan sebagai alat bukti kepolisian, kemudian juga sebagai upaya preventif dari kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

Selain itu Dinas Perhubungan Kota Jambi juga sudah berkoordinasi dengan Pemda Jambi Terutama untuk bisa mengelola ATCS di titik lain yang selama ini pengadaan oleh Pemda Jambi agar terintegrasi seperti di simpang simpang yang ada di Kota Jambi, selain itu dimungkinkan dengan sistem tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE) kepolisian. Dinas Perhubungan Kota jambi sudah memanfaatkan ATCS *voice* sejak awal pandemi Covid-19 untuk imbauan penerapan protokol kesehatan. Termasuk menggunakan teknologi *running text* yang telah terpasang di beberapa simpang jalan

Berdasarkan wawancara pada kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha mengatakan :

“Pihak Dishub tentunya sudah bekerjasama dengan pihak Polres Kota Jambi mengenai pengaturan lalu lintas yang berada di Kota Jambi dan juga mengenai masalah apabila terjadi laka lantas atau tindakan kriminal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak seoaadaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lainnya tentunya rekaman dari CCTV ATCS itu bisa dijadikan sebagai bukti penyelidikan”.³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Komunikasi antar organisasi yaitu komunikasi yang dibangun antara pihak Dishub Kota Jambi, Pemda Kota Jambi dan Polres Kota Jambi yaitu saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya Manusia sebagai pelaksana implementasi kebijakan , dimana sumber daya manusia tersebut memiliki umlah yang cukup dan memiliki kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia dalam pengimplementasian ATCS ini masih sangat kurang, jumlah yang ada hanya satu orang staff operasional yang tentunya jumlah ini tidak seimbang dengan jumlah keseluruhan ATCS yang terpasang, dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada maka staff ATCS harus merangkap tugas sebagai sisadmin atau operator.

Berdasarkan wawancara pada petugas operator ATCS bapak Erik Hamzah menyatakan :

“Dalam pengoperasian program ATCS masih kurangnya staf yang dapat mengoperasikan ATCS, selain itu jumlah staf ATCS dan kamera ATCS juga tidak seimbang sehingga saat terjadi permasalahan atau kerusakan pada ATCS perbaikan yang dilakukan memakan waktu yang agak lama.”³²

3. Disposisi

Dalam pengimplementasian ATCS Dinas Perhubungan Kota Jambi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), yang bertanggung jawab mulai dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi kemudian Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, selanjutnya staf pada ATCS. Para operator ATCS sudah memahami bagaimana cara mengoperasikan ATCS dan tujuan

³¹ Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha pada tanggal 17 Januari 2023

³² Wawancara petugas ATCS Dishub Kota Jambi Erik Hamzah pada tanggal 17 Januari 2023



dari adanya ATCS itu sendiri. Intensitas tanggapan dari para pelaksana dalam hal ini staff ATCS cukup tinggi, meskipun kekurangan sumber daya manusia akan tetapi staff telah memaksimalkan dengan cara merangkap tugas baik itu sebagai operator ataupun sebagai teknisi di lapangan, dan para staff juga bekerja dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, berdasarkan struktur birokrasi pada Dinas Perhubungan Kota Jambi dikepalai oleh Kepala Dinas yang berwenang memberikan komando secara langsung kepada sekretaris dinas, Kepala Bidang dan staf lainnya.

Regulasi merupakan suatu peraturan yang ada dalam suatu lembaga, peraturan ini terdiri dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Sistem regulasi yang teratur biasanya berpacu dalam meningkatkan dan pengawasan kinerja yang ada dalam lembaga secara terus menerus dengan berbagai kebijakan sebagai landasannya.

B. Kendala Program ATCS Di Kota Jambi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu upaya hukum untuk mengatur masyarakat dalam berkendara agar terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas. Lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Di dalam undang-undang ini juga mengatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-undang ini diberlakukan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, dan lancar. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, dan efisien,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak seoaadan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah³³ daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat³⁴

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas, tetapi tidak benar-benar menghilangkan permasalahan lalu lintas seperti kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang dapat menyebabkan kemacetan, kecelakaan, hingga pelanggaran lalu lintas. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, mulai dari melanggar rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, hingga tidak lengkapnya surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi. Dan ditambah pula pola pikir masyarakat yang hanya takut melanggar jika ada petugas, akan tetapi ketika tidak ada petugas maka pengendara tidak merasa takut dan cenderung akan melakukan tindak pelanggaran lalu lintas.

ATCS merupakan salah satu bentuk manajemen rekayasa lalu lintas di persimpangan jalan hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 93 ayat (1) dan (2) mengenai pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas, yang berbunyi:

1. “Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus; b. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki; Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat; c. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas; d. Pemaduan berbagai moda angkutan; e. Pengendalian Lalu Lintas pada

³³ Implementasi Area Traffic Control System Dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas Di Kota Serang

³⁴ Kansil, 1955:15. dalam Sadono, 2016: 67)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

persimpangan; f. Pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau Perlindungan terhadap lingkungan”.³⁵

Di kota Jambi terdapat 26 ATCS tentunya 26 ATCS tersebut tidak dapat memaksimalkan penerapan ATCS di Kota Jambi dikarenakan ATCS tidak terpasang di setiap persimpangan traffic light yang ada di Kota Jambi, hal ini disebabkan dana yang masih kurang untuk menerapkan ATCS di setiap persimpangan.

Sebagaimana wawancara terhadap petugas operator ATCS bapak Erik Hamzah (25) mengatakan bahwa:

“Kendala yang sering terjadi di ATCS Kota Jambi saat ini sering mengalami sinyal buruk dan mati lampu di daerah ATCS sehingga kamera tidak bisa merekam aktivitas kendaraan di persimpangan jalan, demikian pula dengan jaringan yang buruk maka kamera berbasis mikro controller tidak bisa tersambung dengan komputer ATCS.”³⁶

Lalu petugas operator ATCS bapak Erik Hamzah juga menambahkan :

“Kendala lain dalam pengoperasian program ATCS juga pada kurangnya staf yang dapat mengoperasikan ATCS, selain itu jumlah staf ATCS dan kamera ATCS juga tidak seimbang sehingga saat terjadi permasalahan atau kerusakan pada ATCS perbaikan yang dilakukan memakan waktu yang agak lama.”

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Peraturan tersebut menjadi dasar penegak hukum dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran, menurut Soedjono Soekamto, dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor manusia, sarana jalan, kendaraan, dan keadaan alam. Faktor

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 93

³⁶ Wawancara Petugas operator ATCS Dishub Kota Jambi Erik Hamzah pada tanggal 17 Januari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

manusia menjadi salah satu faktor dalam melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dalam berkendara dan kurangnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan penghapusan tilang manual. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalitas kepolisian. Penghapusan tilang manual yang dibarengi dengan transformasi sistem penilangan menjadi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya pungli. Aturan penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, atau rekaman peralatan elektronik. Kemudian adapun kendala penerapan tilang elektronik di masyarakat yaitu pemberian surat tilang kepada masyarakat yang di tilang secara elektronik serta masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai sistem tilang elektronik ini.

Sebagaimana wawancara kepala dinas perhubungan Saleh Ridha menyatakan :

“Saat ini pihak dishub bersama polres Kota Jambi masih mengalami kesulitan dalam pemberian surat tilang elektronik pada masyarakat dan masih ada masyarakat yang belum memahami sistem tilang elektronik ini.”³⁷

³⁷ Wawancara Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridha pada tanggal 15 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Respon Masyarakat Terkait ATCS Di Kota Jambi

Untuk mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui perilaku, persepsi, sikap dan partisipasi

1. Perilaku Masyarakat

Perilaku adalah suatu tindakan atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi pada diri manusia, dan kondisi sosial atau keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan Soekanto yang mendefinisikan perilaku adalah jawaban atau tanggapan seseorang terhadap suatu keadaan. Setelah adanya ATCS di Kota Jambi beberapa pengendara sedikit lebih patuh dalam berkendara, karena merasa diawasi oleh adanya perangkat CCTV, dan adanya peringatan dari pengeras suara. Namun masih banyak pengendara yang juga masih saja melanggar lalu lintas seperti melanggar zebra cross. Hal ini dikarenakan pengeras suara yang tidak setiap saat berbunyi di setiap persimpangan yang terpasang ATCS dan suara peringatan tidak secara langsung atau live tetapi hanya berupa rekaman saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto, apabila perilaku masyarakat dihubungkan dengan kebijakan pemerintah, maka perilaku masyarakat dapat disebut sebagai suatu tanggapan atau reaksi masyarakat berupa tindakan langsung atau tindakan tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu masyarakat atau pengendara yang ada di kota jambi beberapa ada yang pro kontra terhadap program ATCS ini beberapa mereka ada yang merasa keberatan karna beberapa hal yakni pelanggar yang tidak menggunakan kendaraan pribadi karna sistem tilang melalui kendaraan masyarakat yang juga masih sering meminjamkan kendaraan kekeluarga ataupun kerabat lain yang tak jarang mereka melakukan pelanggaran yang direkam oleh atcs

Hal tersebut terlihat dari wawancara terhadap masyarakat pak Rudi Hartono yang menyatakan bahwa:

“Yang kami takutkan ketika kendaraan di pakai oleh kerabat dan mereka melanggar, akan tetapi petugas tidak tahu menahu siapa yang melanggar bahkan mereka mendatangi rumah pemilik kendaraan dan menilang pemilik kendraan “³⁸

³⁸ Wawancara dengan masyarakat Kota Jambi pada tanggal 18 Januari 2023

Kemudian pernyataan tersebut didukung oleh beberapa pendapat masyarakat yakni Putra (38) mengatakan :

“Kami maunya penilangan sesuai dengan pelanggaran bukan pemilik kendaraan seperti halnya yang terjadi dan yang dilakukan oleh polisi selama ini, karna jika tidak mungkin kami tidak memijamkan kendaraan kepada kerabat yang membutuhkan”.³⁹

2. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Para pengendara sudah mengetahui dan memahami apa itu sistem ATCS atau lebih dikenal dengan CCTV bersuara dan para pengendara juga mengetahui adanya ATCS di Kota Jambi yang terpasang di beberapa persimpangan yang ada di Kota Jambi. Namun hanya sedikit mengurangi pelanggaran lalu lintas di persimpangan, dan tidak terlalu berpengaruh yang signifikan terhadap perilaku pengendara, hal ini dikarenakan sistem ATCS yang dirasa belum baik, seperti yang terjadi adalah suara peringatan di semua persimpangan yang terpasang ATCS ini masih berupa rekaman atau tidak secara langsung memperingati pelanggaran dan hanya berupa himbauan.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwasanya sistem pelanggaran yang dilakukan dengan cara merekam plat nomor kendaraan dan menindak lanjutkan dengan mendatangkan pelanggaran/pemilik kendaraan kediaman mereka tidak sangat efisien., akan tetapi pro yang ada menyetujui atau mendukung pemerintah untuk melakukan program atcs tersebut karna mereka bisa merekam kejadian di persimpangan jalan yang kadang merekam kejadian yang tidak diinginkan tanpa sengaja .

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat bapak Sunardi menyatakan bahwa :

³⁹ Wawancara dengan masyarakat Kota Jambi pada tanggal 18 Januari 2023



“Saya sebagai masyarakat tentunya sangat mendukung dengan adanya ATCS ini namun yang jadi kendala masyarakat ini tentunya tidak semua masyarakat memahami cara kerja ATCS dan ada juga masyarakat ini tidak mengetahui bahwa mereka terkena tilang elektronik.”⁴⁰

Kemudian wawancara bersama masyarakat bapak Tarmizi menyatakan bahwa :

“Saya sebagai masyarakat Kota Jambi merasakan sendiri manfaat dari adanya ATCS ini, mulai dari penggunaan lalulintas menjadi tertib dari sebelumnya dan pengurain kemacetan menjadi lebih mudah dengan ATCS, sampai dengan kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau kemalingin bisa direkam disetiap persimpangan.”⁴¹

Pemerintah Kota Jambi berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas di jalan. Salah satunya dengan memanfaatkan kamera dan *voice announcer* pada simpang simpang yang telah terpasang *area traffic control system* (ATCS). Pengendara yang melanggar akan terlihat di kamera dan akan diingatkan langsung melalui *voice announcer* ATCS.

3. Sikap Masyarakat

Berdasarkan pendapat Brata, sikap merupakan kumpulan perasaan, keyakinan dan kecenderungan perilaku yang secara relatif berlangsung lama yang ditujukan pada orang, ide, objek, dan kelompok tertentu. Sikap masyarakat merupakan ungkapan perasaan masyarakat tentang suatu objek dan menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut.

Masyarakat menerima adanya kebijakan ATCS di Kota Jambi karena dengan adanya ATCS telah membuat kemajuan untuk Kota Jambi. Beberapa pengendara juga telah mematuhi lalu lintas di persimpangan yang dipasang ATCS, walaupun masih banyak pengendara yang masih melanggar, dikarenakan ATCS yang masih kurang baik di Kota Jambi, terlihat pada

⁴⁰ Wawancara dengan masyarakat Kota Jambi pada tanggal 9 Mei 2023

⁴¹ Wawancara dengan masyarakat Kota Jambi pada tanggal 9 Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang diperjualbelikan atau diumumkan di media massa atau di publikasi lain tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengeras suara yang terdengar kecil, dan jarang ada himbauan atau peringatan bagi pengendara yang melanggar lalu lintas.

Sebagaimana wawancara dengan masyarakat yaitu dengan Eliyati mengatakan:

“Saya sebagai masyarakat awam tentunya sangat mendukung adanya program ATCS, saya berharap dengan adanya program ini keadaan lalu lintas dapat diatur dengan baik, dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran yang terjadi di jalan, dan semoga dengan adanya program ini juga bisa membuat Kota Jambi berkembang lebih maju lagi.”⁴²

Masyarakat tentunya mempercayai pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam pengelolaan ATCS, karena Dinas Perhubungan sendiri memiliki tugas dan fungsi yang tepat dalam mengelola sistem ATCS.

4. Peran Serta Masyarakat

Keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam pelaksanaan setiap program pembangunan, tetapi memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keterlibatan masyarakat harus diutamakan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah tidak boleh diabaikan. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Beberapa pengendara sangat mendukung adanya ATCS di Kota Jambi dan telah memiliki peran penting dalam kesuksesan ATCS ini karena pengendara merupakan orang atau masyarakat secara langsung menjadi sasaran ATCS. Adapun bentuk bentuk partisipasi yang telah dilakukan masyarakat

⁴² Wawancara dengan masyarakat Kota Jambi pada tanggal 9 Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaodan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yaitu berupa kepatuhan dalam berkendara di lalu lintas. Walaupun hanya sedikit yang patuh dalam lalu lintas.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KEGISI
SULTHAN THAHAN SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak seacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi ATCS sebagai pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kota Jambi ini dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas dan kemacetan di area Kota Jambi. Namun dalam proses pengimplementasiannya belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan tujuan dari adanya ATCS di Kota Jambi belum sepenuhnya tercapai, hal ini karena masih banyaknya pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kemudian sumber daya manusia dalam pengimplementasian masih sangat kurang hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sehingga para staff ATCS harus merangkap tugas baik sebagai operator ataupun teknisi di lapangan.
2. Penerapan program ATCS memiliki beberapa kendala yakni pemasangan ATCS yang belum bisa menyeluruh di setiap persimpangan lampu lalu lintas, serta jumlah operator ATCS yang terbatas sehingga tidak dapat memaksimalkan penerapan program ATCS di Kota Jambi. Dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi peraturan lalu lintas.
3. Implementasi Kebijakan program ATCS sebagai pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kota Jambi mendapat respon positif oleh masyarakat Kota Jambi. Karena dengan adanya ATCS merupakan bentuk kemajuan tersendiri bagi Kota Jambi, dan setelah adanya ATCS di Kota Jambi para pengendara sedikit lebih patuh dalam berkendara, karena merasa diawasi oleh adanya perangkat CCTV, dan adanya

peringatan dari pengeras suara, para pengendara juga menerima dan mendukung kebijakan dari pemerintah ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Jambi, diharapkan agar pihak dishub menempatkan sistem ATCS di seluruh persimpangan Kota Jambi, sehingga pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir. Dan sebaiknya pihak dishub maupun kepolisian bersosialisasi dengan matang dan memusatkan program tersebut ke beberapa titik yang benar benar rawan pelanggar lalu lintas agar masyarakat bisa menerima dan tidak ada lagi perdebatan antara pengendara dengan pihak dishub.
2. Bagi peneliti selanjutnya di harapkan untuk memperluas bahasan mengenai penerapan Area Traffic Control System (ATCS) ataupun sistem lain yang digunakan untuk memantau lalu lintas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaodan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta)
- Gulo, W. (2007). *Metode Penelitian*. (Jakarta :PT Gramedia)
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. (Jakarta : Bumi Aksara)
- Nasution. (2008). *Manajemen Transportasi*. (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Nur, Andi Cudai dan Muhammad Guntur, (2019). *Analisis Kebijakan Publik*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar)
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)
- Una Sayuti, (2011). *Pedoman Penulisan Skripsi Edisirevisi*. (Jambi: Syariah Press)

Jurnal :

- Alam, Diki Fahrul, Ronni Juwandi and Ria Yuni Lestari. Implementasi Area Traffic Control System dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas di Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol 4 No 1
- Andi Zulfikar, Z. (2018). Analisis kinerja Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kota Makassar (Skripsi, Politeknik STIA LAN Makassar)
- Arifin, Jaenal. (2014) Dampak Sosial Kebijakan, Perencanaan Penutupan Lokalisasi Moroseneng di Kec. benowo Surabaya (Skripsi UIN Sunan Ampel)
- Desrinelti, Maghfirah Afifah dan Nurhizrah Gistituati.(2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*. Vol. 6 No.1
- Kadir, Abdul. (2006). Transportasi : Peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional, *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau*, 1(3)
- Kurniati, Ni Luh Wayan Rita. (2019). Optimisasi Kinerja Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Balikpapan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*. Vol. 21 No.2



- Mamentu, Samuel S, Lucia I.R Lefrandt and James A. Timboeleng. Evaluasi Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) Pada Simpang Bersinyal. *Jurnal Sipil Statik*. Vol 7 No 2
- Marpaung, Anggi Kartika. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS) dalam Pengawasan Lalu Lintas di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 2(1).
- Naway, Fauziah Ramadhana, dan Fitri Suryani.(2023). Perencanaan Area Traffic Control System (ATCS) Untuk Optimasi Kinerja Persimpangan Pada Jalan H.M Joyo Martono Kota Bekasi. *Jurnal Ikraith-Teknologi*, Vol 7 No 1
- Roring, Andreas Delpiero, Michael S. Mantiri dan Marlien T. Lapian. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*. Vol.1, No. 2
- Silaban, Tesya Margareta Silaban, dan Siti Hazzah Nur. R. (2023). Implementasi Program Area Traffic Control System (Atcs) Dalam Ketertiban Berlalu Lintas Di Kota Medan. *Journal of Science and Social Research*. Vol. VI No. 1

Sumber Lain :

Undang Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Lintas

<https://dishub.kedirikota.go.id>

<https://www.bps.go.id><https://www.metrojambi.com/pemasangan-atcs-dan-cctv-di-jambi-urai-kemacetan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebaadain dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
 Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-106 /D.II.1/PP.00.11/1/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Riset

Jambi, 06 Januari 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Jambi
 Di -

 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Muhlisin**
 NIM : 105180190
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Judul Skripsi : **Implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Jambi.**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi
 Waktu Penelitian : 06 Januari 2023 – 06 April 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Informan

Tabel 1
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Waktu
1.	Saleh ridho	Kepala dishub kota jambi	17 januari 2023
2.	Erik hamzah	Operator ATCS	17 januari 2023
3.	Putra	Masyarakat	18 januari 2023
4.	Budiman	Masyarakat	18 januari 2023
5	Eliyati	Masyarakat	9 Mei 2023
6	Sunardi	Masyarakat	9 Mei 2023
7	Tarmizi	Masyarakat	9 Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara fisik dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 2 : Daftar Pedoman Wawancara

Narasumber :Dinas Perhubungan Kota Jambi

1. Apa itu dishub?
2. Apa visi dan misi struktur prganisasi dan aturan kerja dishub?
3. Bagaimana pembagian kerja dishub kota jambi? (anggota, tugas anggota)
4. Apakah tugas dishub hanya mengatur mengenai kendaraan saja?
5. Apakah ada permasalahan atau kendala yang terjadi pada dishub kota jambi?
6. Apakah ada kendala (permasalahan) dalam pengaturan lalu lintas dikota jambi?
7. Bagaimana penerapan atcs dikota jambi?
8. Apa kendala dalam penerapan atcs di kota jambi?

Narasumber dari masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda tentang atcs kota jambi?
2. Bagaimana pengalaman bapak dengan adanya ATCS?
3. Bagaimana dampak yang anda rasakan terkait dengan adanya program ATCS ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

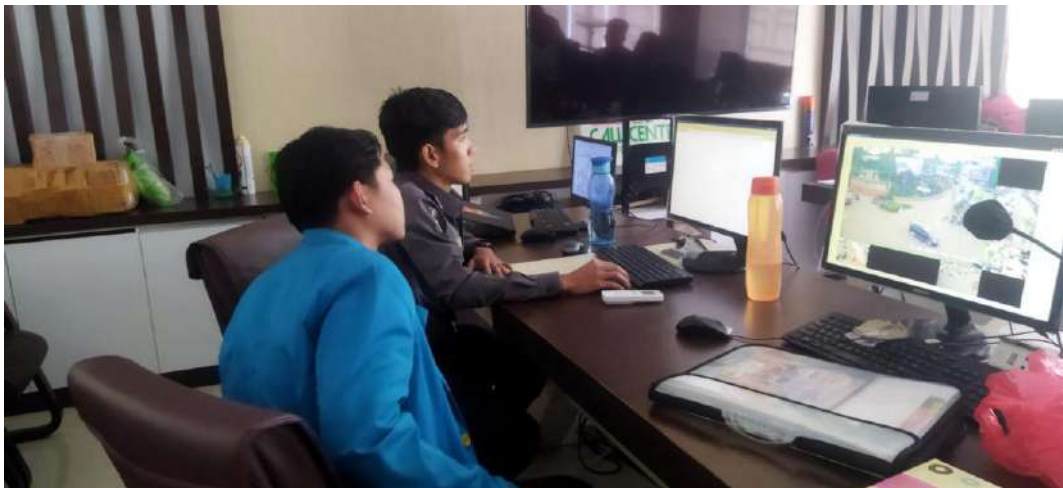
Gambar 1

Bapak Kabid



Gambar 2

Pemantauan ATCS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak secara acuan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 3

Pemantauan Camera disetiap persimpangan

Gambar 4
Voice announcer



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang diperbarvak sebacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 5
Operator ATCS



Gambar 6
Pemantauan ATCS



Gambar 7
Pengaturan lampu



Gambar 8
Pegawai DISHUB



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Gambar 9
Masyarakat



Gambar 10
Masyarakat



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 11

Masyarakat



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KEGORON
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 12

Masyarakat



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KEGOR
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 13**Masyarakat**

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang membatalkan sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Muhlisin
 Jenis kelamin : laki-laki
 Tempat Tanggal Lahir : Pulau Teluk 20 April 1997
 Alamat : RT 05 Pulau Teluk, Sarolangun
 No Telpn/Hp : 085217172594
 Nama Ayah : Idris
 Nama Ibu : Raisah

B. Riwayat Pendidikan

SD/ Mi : SDN No.84 Pulau Teluk
 SMP / MTS : SMP S Julhijjah
 SMA/ MA : SMA S Zulhijjah
 UIN STS JAMBI : Sedang Berlansung

C. Keahlian

- Microsoft Word - Power Point
 - Microsoft Excel - Teamwork



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang diperbarvak sebacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi